

## ABSTRAK

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan kebijakan untuk mengambil alih pengelolaan sepuluh TK swasta di Kota Blitar. Kebijakan ini dilanjutkan pada tahun 2018 dengan menambah lima TK untuk dialihkan menjadi TK negeri. Lima belas TK tersebut sebelumnya merupakan TK swasta yang dikelola oleh dua kelompok/organisasi masyarakat, yakni PKK Kota Blitar dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Blitar. Penelitian ini berusaha menggali bagaimana proses *agenda setting* kebijakan pengalihan status lima belas TK tersebut selama tahun 2016-2018. Penelitian akan menggunakan *multiple stream framework* milik Kingdon dalam usaha untuk memahami bagaimana arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik diarahkan sehingga dapat membuka *policy windows*, dan menyebabkan munculnya kebijakan untuk mengalihkan TK swasta menjadi negeri, dengan tujuan utama yaitu menerapkan pendidikan gratis pada TK Negeri di Kota Blitar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi berupa studi pustaka. Penggunaan pisau analisa *multiple stream framework* menghasilkan penemuan bahwa arus masalah, kebijakan, dan politik dapat dijalankan sedemikian rupa oleh aktor pemangku kebijakan, dalam kasus ini Pemerintah Kota Blitar dengan memanfaatkan momentum awal yaitu peralihan pengelolaan SMA yang sebelumnya dikelola oleh Pemkot, menjadi ranah yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beberapa penyesuaian dalam agenda berlangsung secara cepat, mengikuti setidaknya dua hal: kebiasaan birokrasi, serta situasi atau budaya politik yang ada.

Pada studi ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Blitar, khususnya Samanhudi Anwar serta PDI-P sebagai partai politik yang mendominasi di Kota Blitar dapat menginisiasi sebuah perubahan agenda politik dengan relatif mudah dan cepat. Penyusunan agenda kebijakan yang dilakukan tanpa perlu melalui berbagai prosedur, serta tanpa melibatkan beberapa *stakeholder* didalamnya, ternyata dapat tetap berjalan dengan cukup lancar. Hal ini dipengaruhi oleh iklim politik di Kota Blitar yang memang telah dikuasai oleh Samanhudi maupun PDI-P Kota Blitar. Strategi politik populis yang dijalankannya selama menjabat membuat legitimasi Samanhudi dan PDI-P menjulang tinggi, sehingga upaya resistensi maupun kontrol publik terhadap kebijakan tidak berjalan dengan efektif.